

AGAMA DAN POLITIK: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama

Wasisto Raharjo Jati

Pusat Penelitian Politik, LIPI Jakarta
e-mail: wasisto.raharjo.jati@lipi.go.id

Abstract

This article aims to analyze the comparative study of the liberation theology perspective. The notion of liberation theology is a form of transformative theology that concerned within issues of equality and social justice. The relationship amidst religion and politics is reciprocal due to there are conflicts of interest between both entities. Emergence of liberation theology itself arises because of the politicization of religion has become more acute and chronic so it needs to be transformed. The thought of liberation theology is basically grown in the famous case of Latin America with the spirit church of the poor. However, within Islam, it also found a similar essence that Islam also teaches that there egalitarianism, equality, and social justice. Article will elaborate about this comparison of liberation theology.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis studi perbandingan perspektif teologi pembebasan. Gagasan teologi pembebasan adalah suatu bentuk teologi transformatif yang bersangkutan dalam isu-isu kesetaraan dan keadilan sosial. Hubungan di tengah-tengah agama dan politik adalah timbal balik karena ada konflik kepentingan antara kedua entitas. Munculnya teologi pembebasan itu sendiri timbul karena adanya politisasi agama telah menjadi lebih akut dan kronis sehingga perlu diubah. Pikiran teologi pembebasan pada dasarnya tumbuh dalam kasus terkenal Amerika Latin dengan semangat gereja kaum miskin. Namun, dalam Islam, itu juga menemukan esensi yang sama bahwa Islam juga mengajarkan bahwa ada egalitarianisme, kesetaraan, dan keadilan sosial. Pasal akan menguraikan tentang perbandingan ini teologi pembebasan.

Keywords: teologi pembebasan, agama, politik, egalitarianisme, ekuitas, keadilan sosial

A. Pendahuluan

Membicarakan relasi agama dan politik adalah proses resiprokal yang satu sama lain. Kedua entitas tersebut memiliki proses tarik menarik kepentingan. Agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dalam memberikan kerangka nilai dan norma dalam membangun struktur negara dan pendisiplinan masyarakat. Sedangkan, negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara untuk mematuhi negara. Adanya hubungan timbal balik itulah yang kemudian menimbulkan hubungan dominasi-saling mendominasi antar kedua entitas tersebut. Negara yang didominasi unsur kekuatan agama yang terlalu kuat hanya akan melahirkan negara teokrasi yang cenderung melahirkan adanya hipokrisi moral maupun etika yang ditunjukkan para pemuka agama. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pencampuran unsur teologis dan materialis secara konservatif. Adapun negara yang mendominasi relasi agama justru menciptakan negara sekuler yakni persoalan agama kemudian termarginalkan dan tereduksikan dalam pengaruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di antara kedua model relasi agama dan politik tersebut, hal menarik yang peting untuk dikaji adalah soal dominasi dan kuasa. Munculnya gejala hipokrisi moral dan juga ditambah dengan adanya marginalisasi agama tentu adalah hal yang menjadi *mainstream* kajian dalam membahas kedua hal itu. Namun demikian, hal menarik sebenarnya adalah bagaimana relasi kekuasaan dan pertentangan yang dihadirkan dari dinamika dari kedua entitas tersebut. Agama yang menjadi bahasa politik malah justru menjadi agama penindasan seperti dalam kasus menguatnya kekuasaan Gereja Romawi selama Abad Kegelapan, pertentangan antara faksi-faksi agama Islam dalam Kekhalifan Umayyah hingga Abbasiyah.

Menguatnya negara dengan menyingkirkan adanya peran agama malah justru menjadikan demoralisasi masyarakat yang justru akan berkembang tinggi. Maka inti sarinya adalah adanya depolitisasi agama justru akan menimbulkan anarki, sedangkan apabila terjadi gejala politisasi agama justru menciptakan adanya hipokrisi dan vigilantisme. Oleh karena itulah, sangatlah urgen dan signifikan untuk melacak sisi profetik dari munculnya agama itu sendiri. Harus diakui bahwa pemahaman agama yang dilakukan secara dogmatik malah justru dipolitisasi menjadi alat justifikasi saja. Sedangkan pemahaman agama secara pragmatik, malah justru mengarahkan agama hanya menjadi simbol formal saja, tapi minim instrumentasi nilai dan norma dalam masyarakat.

Kondisi yang serba dilematis itulah yang sebenarnya sangat penting untuk melacak kembali dasar lahirnya agama di dunia. Hadimnya agama di dunia tentu memiliki dasar kuat dalam memberikan pencerahan dalam pengaturan tata perilaku dan norma dalam masyarakat. Secara historis, lahirnya agama di dunia memang didasari atas kondisi masyarakat yang serba *chaotic*. Agama sebenarnya menjadi dasar kuat untuk melakukan reorganisasi ulang terhadap kehidupan masyarakat tersebut dengan menjadikan nilai dan norma agama sebagai dasar pembangunan masyarakat. Konteks itulah yang mendorong adanya pergeseran dimensi sakral menjadi dimensi profane, sehingga agama kemudian ditempatkan juga menjadi agama sosial. Pemaknaan agama sebagai entitas profetik memiliki esensi pembebasan dalam membebaskan masyarakat dari pembodohan maupun kemungkaran.

Dalam era sekarang ini, profetisasi agama kian mengalami tantangan yang kuat dengan menguatnya gejala konservatisme agama yang melihat pemaknaan agama dari sisi literal saja. Kondisi itulah yang sebenarnya menimbulkan de-sakralisasi agama saja, dikarenakan agama telah berkembang menjadi alat politik dalam menguatkan kekuasaan hegemonik yang memanfaatkan agama sebagai alat kuasa. Berkembangnya sekularisasi tentu juga tidak dapat dinisbikan begitu saja, korelasi agama dengan politik tentu tidak bisa dipisahkan. Hal itulah yang sebenarnya menjadi lokus penting dalam mendudukan agama dalam relasi politik terutama dalam melihat sisi profetik politik dalam sisi agama. Hal itulah yang sebenarnya menjadikan relevan dalam membicarakan agama dan politik adalah ketika agama menjadi spirit sosial dan politik dalam menggerakkan umat menuju tatanan yang lebih baik. Maka, konstruksi pemikiran yang membawahi pemikiran agama secara teologis menjadi sosiologis gerakan menjadi menarik untuk diperbincangkan.

Oleh karena itulah, pembahasan mengenai agama sebagai teologi pembebasan dalam konteks ini menjadi penting untuk dibahas. Secara harfiah teologi pembebasan dapat diartikan sebagai tanggapan pemahaman agama dalam membaca kasus ketimpangan sosial-politik yang diakibatkan rezim hegemonik yang melakukan praktik subordinasi dan intimidatif kepada masyarakatnya. Adapun konstruksi pemahaman teologi pembebasan memang sangatlah erat kaitannya dengan munculnya gerakan politik publik yang dilakukan dari akar rumput.

Tulisan ini secara lebih lanjut akan mengelaborasi mengenai konstruksi pemikiran teologi pembebasan dari berbagai mazhab pemikiran baik itu pe-

mikiran teologi pembebasan di dunia Barat, Islam, maupun Latin. Adapun ketiga mazhab tersebut memang memiliki konstruksi politik terhadap pembebasan yang sama yakni melawan ketimpangan yang diakibatkan oleh pengaruh rezim otoriter. Namun yang menjadi menarik adalah masing-masing entitas teologi pembebasan sendiri berkembang sesuai dengan karakteristik berbeda. Teologi pembebasan yang berkembang di Barat sendiri lebih banyak didominasi akar Protestanisme, namun lebih banyak berkembang dalam ranah pemikiran. Teologi pembebasan dalam Islam didominasi pemikiran untuk melawan ketimpangan dan kebodohan. Teologi pembebasan dalam Latin lebih banyak didominasi pemikiran Gereja Romawi dan mengarah pada praksis gerakan.

B. Teologi Pembebasan sebagai “Perdamaian” Marxisme dan Agama

Agama adalah candu bagi masyarakat (*religion is opium for public*) yang dikatakan oleh Karl Marx (1886) maupun Nietzsche yang mengatakan Tuhan telah mati tentu perlu dipahami lebih mendalam. Marx mengkritik tulisannya Feuerbach yang berjudul *Das Wesen des Christentums* (Hakikat Agama Kristen) yang banyak mengangkat tesis agama sebagai proyeksi manusia dalam mengejar kebahagiaan. Agama merupakan sebetuk dari sentimen pribadi yang dibentuk dari sebuah proses relasi sosial yang rigid. Hal itulah yang memungkinkan proses transeden dalam pemaknaan agama dikreasi untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Adanya pendekatan materialistik dalam memahami agama seperti yang diutarakan Feuerbach itulah yang menjadikan agama berkembang menjadi alat justifikasi kelas.

Para agamawan yang semula menjadi penjaga moral mulai terseret pada pengarusutamaan dominasi kelas. Pada akhirnya ajaran agama yang bersifat monastik dan sakral justru berkembang menjadi entitas profan dengan menempatkan para agawan sebagai penjaga kekuasaan penguasa dengan mengikat pemahaman moral masyarakat secara dogmatik.¹ Feuerbach yang mengatakan bahwa agama secara politis memang dimaknai secara proyeksi konstruksi manusia dalam memahami keimanan dan moral pribadi. Adanya pola pe-

¹Ted Sprague, “Pendahuluan pada Sumbangan untuk Kritik terhadap Filsafat Hak Hegel”, <https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1844/PendahuluanSumbangan.htm>, diakses pada tanggal 27 Maret 2014.

mahaman yang tunggal itulah yang menyebabkan adanya penindasan politis kepada masyarakat dimana pihak penguasa ditempatkan sebagai wakil Tuhan.

Freuerbach menilai bahwa adanya penguasaan agama oleh rezim hegemonik berimplikasi pada pembentukan strata kelas-kelas dalam masyarakat. Dalam hal ini terdapat pola penindasan maupun bentuk perilaku subordinatif lainnya yang dilakukan oleh kelas penguasa kepada publik. Adanya dikotomis yang disematkan dalam pembentukan kelas antara yang *privileged* (diistimewakan) dengan yang *neglected* (ditolak) itulah yang kemudian menimbulkan adanya resistensi epistemologis dalam memandang kembali peranan agama dalam masyarakat. Agama sendiri yang semula ditempatkan pada pola pikir abstrak dan monastik mulai direkonstruksi ulang dalam pengaturan norma dan etika masyarakat. Dalam hal ini, muncullah berbagai macam transformasi dan reformasi pemikiran dalam menempatkan agama kembali.

Marx dalam bukunya *Holy Family* menyebutkan bahwa agama berkembang menjadi sumber penindasan bagi masyarakat yang mengalami proletarisasi secara struktural. Adapun kritikan Marx sebenarnya adalah repetisi pernyataan politis Martin Luther yang melihat doktrinasi agama yang dilakukan oleh Gereja Romawi sudah terlalu mengekang humanisme politik yang kemudian menghasilkan adanya gelombang Protestanisme yang berkembang di wilayah Eropa Barat. Hal itu merupakan bentuk pengekspresian dari bentuk keterasingan manusia dalam realitas sosial dimana kontestasi merebutkan material-material maupun kapital sebagai wujud kebebasan manusia. Agama sebenarnya adalah ekspresi keasingan abstrak yang coba dibangkitkan sebagai alat penindasan bagi manusia.

Hal itulah yang kemudian menjadi candu yang membuat ketagihan untuk menjaga survivalitas akan keistimewaan kelas yang didapatkannya². Adanya dogma mengejar kebahagiaan yang tetap mempertahankan kelas penguasaan dan agamawan itulah yang merupakan basis awal pemikiran teologi pembebasan yakni untuk “membebaskan” keterasingan manusia dari model stratifikasi tersebut. Penindasan yang dilangsungkan oleh secara dialektis itulah kemudian dicoba untuk memahami agama secara profetik, bahwa agama melahirkan di dunia sendiri dikarenakan memiliki pembebasan.

²Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 292-293.

Pernyataan Marx mengenai agama sebagai candu sebenarnya adalah upaya untuk mendemistifikasikan agar ajaran agama secara politis tidak berada dalam puncak menara gading. Sakralisasi agama yang berkoheesi dengan model kepemimpinan otoriter mengakibatkan kondisi masyarakat yang serba regulatif-strukturalis. Adanya pola pendisiplinan publik melalui politisasi agama itulah yang menyebabkan adanya degradasi terhadap pemaknaan agama. Adapun berkembangnya agama secara sosial sendiri memiliki pengembangan kuat dalam membentuk gerakan-gerakan yang ditimbulkan masyarakat dalam melawan hegemonik. Perkembangan akar pemikiran politis tentang teologi pembebasan sendiri memiliki kaitan kuat antara pemikiran Marxisme dengan pendalaman agama secara profetik yakni mendudukkan agama secara politis.

C. Melacak Akar Pemikiran Teologi Pembebasan

Hadirnya agama di dunia memiliki esensi mendasar yakni untuk membebaskan umat manusia dari segala bentuk penderitaan di dunia. Baik dari rumpun agama Samawi, Judeo-Kristiani, maupun Hindu-Buddha masing-masing memiliki dalil yang cukup kuat dalam menerangkan kesahihan agama sebagai pembebas. Esensi pembebasan memiliki pengertian bahwa pemahaman agama sebenarnya lebih mengarah pada ajaran profetik yakni bagaimana agama berperan membangun sistem dan nilai baru.

Hal itulah yang kemudian coba ditangkap sebagai bentuk sosialisasi agama memiliki peranan penting dalam membina kerangka sosial masyarakat. Agama tidak hanya berbicara sakral semata, namun dimensi profan juga menjadi dipertaruhkan. Politisasi agama berkembang manakala agama kemudian diinterpretasi secara pluralistik oleh berbagai kalangan. Interpretasi pluralis yang menjadikan adanya politisasi terhadap dogma mejadi ajang pembenaran kolektif untuk menekan minoritas. Adanya berbagai macam faksionalisasi timbul dalam agama-agama di dunia ini sebenarnya tidak terlepas dari proses politisasi terhadap ajaran agama sendiri. Pertentangan dalam memahami ajaran yang kemudian menimbulkan adanya kelompok-kelompok *liyan (others)* yang selama ini dianggap bukan bagian dari mayoritas.

Dikotomi yang berimplikasi kepada *the others* dan yang lain menjadi *the hegemonic* tentu adalah produk dari pada politisasi agama. Terbentuknya kelas penguasa yang disokong oleh saluran korporatisme agamawan, adanya kelas yang *privileged* maupun *neglected* dalam dinamika masyarakat, maupun muncul-

nya *the others* tersebut merupakan sebetuk dari esensi “penindasan” maupun “ketimpangan” dalam masyarakat sebagaimana yang diakibatkan oleh pengarus-utamaan politisasi agama secara *mainstream*.

Sebelum membahas mengenai teologi pembebasan secara leksikal dan mendalam, terlebih dahulu memahami lebih mendalam mengenai pemaknaan tentang teologi pembebasan. Adapun teologi pembebasan sendiri dipahami sebagai teologi yang hanya menguliti sisi transeden saja, tapi juga memdedah mengenai sisi pembahasan praktikalnya juga. Artinya bahwa doktrinasi agama yang mengarah pada represifisitas iman dan norma seseorang untuk selalu taat dan patuh kepada ajaran agama harus segera direkonstruksi ulang secara menyeluruh dan transformatif³.

Dalam hal ini, perlu ditonjolkan mengenai sisi dari pada penghayatan iman atau dimensi religiositas yang perlu diutamakan. Hal inilah yang sejatinya menjadi *missing link* ketika agama dipahami secara relasional dari atas (*top down*), justru menghasilkan adanya proses justifikasi agama oleh negara sehingga membuahkan pada munculnya agama negara (*state religion*). Pemaknaan agama negara sendiri menegaskan adanya intervensi terhadap ajaran agama. Sesuatu yang paling terlihat jelas dari proses politisasi tersebut adalah penekananan terhadap aspek-aspek sekuritas (*security*), loyalitas (*loyalty*), maupun keselamatan (*salvation*). Masing-masing ketiga paham memiliki berbagai bentuk pemahaman tersendiri-sendiri yakni sekuriti (*security*) sendiri memiliki makna bahwa manusia yang hidup di dunia maupun akhirat sendiri adalah entitas yang rentan sehingga menjadikan posisi tempat ibadah sendiri menjadi satu satunya juru selamat (*messiah*) bagi seluruh umat manusia di dunia.

Kondisi itulah yang menyebabkan adanya keterkekangan yang dialami oleh manusia oleh agama. Loyalitas tersebut merupakan buah dari proses kerentanan yakni menuntut kesetiaan umat manusia untuk selalu terikat dalam doktrinasi agama yang komplikatif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan aspek keselamatan adalah adanya proses ketergantungan terhadap tempat ibadah (gereja) sebagai *locus standi* untuk menjadi umat yang selamat di dunia yakni manusia tidak akan selamat tanpa ada dukungan dari sebuah institusi ibadah. Adapun besarnya pengaruh politik terhadap aksentuasi ketiga hal yang ditunjukkan dari proses sinergisitas agama dan politik itulah yang menjadikan adanya pelanggeng-

³Wahono Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 19-20.

an kelas-kelas dalam melakukan dominasi-subordinasi sehingga menimbulkan adanya penindasan terhadap masyarakat.

Adanya stratifikasi sosial yang sedemikian tentu merupakan sebetulnya anomali penyimpangan ajaran agama. Lahirnya teologi pembebasan adalah respons dari proses politisasi agama dan negara secara massif. Momentum ini digunakan untuk mengembalikan pemahaman agama sendiri secara *bottom up* yakni memahami agama sendiri secara dari bawah tentang bagaimana agama dapat memecahkan segala persoalan sosial masyarakat. Sehingga dari situlah kemudian esensi pembebasan dapat dilihat dari konteks agama tersebut. Hal itulah yang menjadikan konteks profetisasi agama sendiri kemudian perlu untuk diperlihatkan.

Secara historis, munculnya pemikiran maupun gerakan teologi pembebasan sendiri memang berasal dari kondisi sosio kultural Amerika Latin. Kawasan Latin yang selama ini dikenal kawasan bergejolak karena pengalaman kolonialisme yang begitu panjang memiliki sejarah penindasan dan ketimpangan yang kuat. Pengalaman panjang kolonialisme Spanyol di kawasan Amerika Latin sendiri menjadikan ajaran-ajaran Gereja Katolik Roma sendiri menjadi agama utama bagi seluruh masyarakat di kawasan tersebut. Tentunya hal ini menjadi menarik, karena akar-akar pembebasan terhadap gerakan perlawanan biasanya berasal dari tradisi Protestantisme.

Secara teologis, protestantisme sendiri memiliki sejarah panjang melawan hegemoni terhadap doktrin Katolik Romawi yang dinilai sudah menyimpang dari ajaran agama. Adapun posisi Gereja Katolik di tengah dinamika masyarakat kawasan Latin sendiri menjadi lokus penting dalam memahami konteks nalar perkembangan teologi pembebasan. Hal penting yang harus dipahami dalam memahami adalah posisi gereja saat itu. Gereja dalam kawasan Amerika Latin memiliki sejarah panjang terhadap dilema yang dihadapi antara memihak pada negara ataukah memihak pada masyarakat. Adanya dilematis itulah yang menciptakan pesan misionaris yang dilakukan antara *church oriented* yang berorientasi pada pelayanan gereja dan negara ataukah *world oriented* yang mengarah pada pelayanan pada umat secara keseluruhan.

Secara historis sendiri, posisi gereja sendiri memang cenderung memihak pada rezim otoriter dikarenakan terganjal pada masalah pembiayaan institusi. Oleh karena itulah, gereja sendiri berada dalam posisi pragmatis yakni mendukung eksistensi rezim otoritarian yang berkuasa. Adanya pembiaran yang

dilakukan oleh gereja itulah yang menimbulkan adanya perdebatan-perdebatan teologis dalam sekte Gereja Roma di kawasan Amerika Latin. Hal inilah yang menciptakan pemikiran-pemikiran kritis dari Ordo Jesuit yang cenderung melihat posisi dan pemaknaan gereja itu sendiri. Pemikiran Ordo Jesuit sangatlah berbeda dengan ajaran Ordo Roma yang selama ini cenderung mempertahankan adanya kekuasaan *status quo* rezim otoriter.

Pemikiran-pemikiran Ordo Jesuit yang mengarahkan kepada pola pemikiran yang anti *mainstream* maupun anti ortodoksi sendiri memang mengandung pemikiran resistensi. Poin pertama tentang orientasi agama hadir di dunia bukanlah selalu mengarahkan kepada aspek keselamatan (*salvation*) maupun bentuk penghakiman (*condemnation*) terhadap kedudukan manusia selama hidup di dunia. Namun mengarahkan kepada bentuk pembebasan (*liberated*) terhadap umat manusia di dunia segala bentuk penderitaan. Kondisi itulah yang mungkin menjadi bentuk pribumisasi agama agar jangan sampai berada di puncak menara gading. Dalam perkembangan selanjutnya, pemahaman teologi pembebasan sendiri sudah berkembang pada permulaan abad ke-16 silam. Adalah Bartholomeo de Casas, seorang misionaris India-Spanyol yang mempopulerkan ajaran ini dalam kegiatan misionarisnya di pedalaman Peru.

Casas menilai bahwa misionarisme yang dijalankan oleh Spanyol dalam menaklukkan Amerika Selatan sudah melenceng dari misi Gereja Roma dalam mendiseminasikan ajaran tersebut ke penduduk setempat.⁴ Dalam faktanya ditemukan realitas bahwa, misionarisme yang tujuan awalnya adalah untuk “membebaskan” adanya kekafiran penduduk lokal dengan memeluk agama Katolik, justru mengarah pada proses penindasan kepada masyarakat. Penindasan tersebut mengarahkan pada proses pemiskinan yang dialami oleh penduduk lokal. Kondisi mengenaskan itulah yang coba untuk dirombak dalam melihat posisi Gereja dalam posisi masyarakat. Gereja harus berada dalam posisi pelayanan kepada umat daripada pelayanan kepada negara. Oleh karena itulah, gereja perlu bergabung dengan bagian dari proses revolusionerisme politik dalam melawan rezim hegemonik.

Anasir lainnya yang dapat dilihat dari hasil misionarisme selain halnya Casas bisa disimak dari pemahaman Petras dan Veltmeyer (2009). Karya keduanya

⁴Michael Cook, “Jesus from The Other Side of History: Christology in Latin America,” *Journal Current Theology*, Vol. 44, No. 2, h. 260.

yang berjudul "*Social Movement in Latin America*" mendeskripsikan bahwa munculnya gerakan-gerakan yang terlahirkan dalam akar rumput masyarakat memang banyak terinspirasi dari munculnya koalisi yang dibangun antara gereja dengan masyarakat dalam melakukan resistensi.⁵ Tampilnya gereja sebagai pionir gerakan dalam masa poskolonialisme sendiri memang banyak dipengaruhi pemikiran progresif dalam melakukan reforma agraria maupun reforma industri.

Posisi gereja sendiri mengalami posisi distortif dalam posisinya lembaga pelayanan umat menjadi lembaga pembela pemiskinan. Implikasi yang timbul kemudian munculnya pergeseran tentang orientasi beragama yang semula hanya terpaku pada masalah dogma dan pengaturan norma (etika) yang sepenuhnya hanya mengurus pada masalah abstraksi saja. Teologi juga harus menyinggung tentang solusi pada penyelesaian masalah sosial yang berkembang dalam dinamika masyarakat. Maka sangatlah urgen dan signifikan dalam melacak peta pemikiran mengenai pemahaman teologi pembebasan yang berkembang dalam konteks Amerika Latin untuk kemudian dipertautkan dengan kasus lainnya.

D. Melacak Akar Pemikiran Teologi Pembebasan di Amerika Latin

Pemikiran Teologi Pembebasan yang berkembang di kawasan Latin perlu menjadi kajian pendahuluan dalam membahas agama dan politik. Hal ini jelas terkait dengan berkembangnya pemikiran politik kiri yang bersinergis agama sehingga memunculkan adanya teologi pembebasan. Secara garis besar, pemikiran politik Marxisme sendiri banyak mempengaruhi pemikiran teologi pembebasan yang terangkum dalam beberapa poin mendasar berikut ini: 1) analisis perjuangan kelas; 2) menolak adanya akumulasi kapital dan kepemilikan pribadi; 3) mendukung adanya gerakan perubahan; 4) manusia perlu dinilai sebagai makhluk sosialis dan bukan mengarah pada persaingan kompetitif.⁶

Adanya empat parameter sebenarnya memiliki kaitan praksis dalam membuat agama tidak hanya berlaku dalam nalar profan. Adapun nilai-nilai praksis yang dapat dilihat dalam merekonstruksi makna teologi pembebasan

⁵James Petras, *Social Movement in Latin America*, (New York: Palgrave, 2011), h. 84.

⁶Natalie, "Evaluasi Kritis terhadap Doktrin Gereja dari Teologi Pembebasan," *Jurnal Veritas*, Vol. 1, No. 2, 2000 h. 185.

antara lain: 1) relasi agama dan umat janganlah bersifat transedental, namun perlu didudukkan dalam relasi setara; 2) dimensi spiritualitas perlu dikondisikan dengan religiusitas; 3) agama diciptakan sebagai resolusi masalah, bukan pada pembentuk norma kepatuhan; 4) agama juga perlu mendukung adanya transformasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Adanya relasi nilai dan praksis itulah yang kemudian coba untuk melihat berbagai bentuk perspektif teologi pembebasan yang coba untuk dibahas dalam berbagai produk pemikiran yang berkembang dalam berbebagai macam perspektif. Mulai dari pemikir-pemikir seperti halnya Gustavo Gutierrez, Michael Lowly, maupun lain sebagainya. Bahwa teologi pembebasan sendiri perlu menghadirkan adanya Tuhan di tengah-tengah dinamika masyarakat. Maka diperlukan adanya kontemplasi politik dalam merekonstruksi ulang dalam memaknai agama.

Perspektif pertama yang datang dalam pemahaman teologi pembebasan Gustavo Gutierrez, seorang pastor kelahiran Peru. Menurut anasir politik yang dilakukan oleh Gutierrez, lahirnya teologi pembebasan sendiri merupakan bentuk kritikan atas dua tradisi politis antara Kristen yang liberal maupun Katolik yang konservatif. Adapun eskatologis yang disampaikan dalam tradisi Liberal yang melihat agama "mengizinkan" adanya persaingan dalam merebut kebahagiaan (*pursuing of happiness*), justru kian melanggengkan adanya ketertindasan.

Konteks penebusan dosa (*redemption*) yang didasarkan atas konstruksi persaingan sehingga kemudian menjadi kaum terpilih, berimplikasi pada marginalisasi pada kelompok yang tersingkirkan. Sedangkan konteks penebusan dalam ajaran Katolik sendiri masih mengandaikan bahwa manusia akan selalu berdosa apabila dirinya tidak mengikatkan diri pada pelayanan gereja. Posisi gereja yang menempatkan sebagai lembaga suci yang bisa menebus dosa, ternyata juga menimbulkan adanya stigmatisasi bahwa agama menimbulkan adanya penindasan dan proses pengekangan terhadap etika dan moral manusia. Maka dari adanya dua sumber penindasan tersebut yang menjadikan pemahaman teologi agama perlu direkonstruksi ulang. Postulat berharga yang disampaikan oleh Gutierrez sendiri dalam pemahamannya adalah gereja untuk orang miskin (*church for the poor*) sebagai basis teologi itu sendiri.⁷

⁷James Nickloff, "Church of The Poor: The Ecclesiology of Gustavo Gutierrez," *Journal Theological Studies*, Vol. 54, No. 1, 1993, h. 512-514.

Pengarusutamaan terhadap pembelaan kaum miskin adalah menjadi lokus dalam teologi. Dalam pemahaman teologi ini, kaum miskin memang mendapatkan keistimewaan tersendiri. Hal ini dikarenakan orang miskin sejatinya adalah kaum terpilih dan tersayangi oleh Tuhan. Adanya pemilihan terhadap kaum miskin tersebut mungkin agak distorsi dengan konteks orang terpilih (*chosen one*) baik dalam tradisi Katolik maupun Protestan. Kristen sendiri melihat bahwa orang yang bekerja keras maupun kompetitif yang mendapatkan adanya keistimewaan dari Tuhan. Sedangkan, dalam tradisi Katolik sendiri adalah keistimewaan sendiri masih berorientasi konservatif kepada para agamawan maupun bangsawan yang disebut sebagai kaum terpilih yang membantu masyarakat menuju pembebasan.

Pengalaman misionarisme sendiri yang berlangsung dalam Amerika Latin sangatlah beraroma konstestasi dua mazhab tersebut, yakni antara kompetisi dan konservatisme *status quo* sendiri. Adanya rivalitas dua corak pemikiran inilah yang sebenarnya merupakan sumber penindasan baru dalam pengalaman Amerika Latin.

Dalam kasus Latin sendiri, esensi “pencerahan” yang ingin diutarakan justru menimbulkan adanya marginalisasi bagi penduduk lokal. Penduduk lokal hanya menjadi partisipan pasif yang diindoktrinasi soal adanya konsep Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu disembah maupun cara menghindari adanya penghukuman Tuhan di dunia dengan cara bersaing untuk menjadi kaum yang terpilih, atau hanya sekedar bersikap taklid pada institusi gereja. Tentunya apabila diriilkan dalam kondisi masyarakat Amerika Latin yang serba terbelakang. Pemahaman agama sedemikian eklektik maupun eksklusif tersebut menjadikan pesan-pesan pencerahan sebagaimana yang diinginkan dalam agama sendiri tidak tersampaikan maksimal. Jikalau disuruh untuk bersikap *taklid* untuk setia dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kewajiban sebagai pemeluk agama tentu sudah dilakukan. Namun yang menjadi masalah adalah Tuhan itu terasa jauh dari umatnya dan tidak mampu memecahkan permasalahan yang timbul dari dalam masyarakat.

Kedua, mengenai cara untuk menghindasi adanya hukuman Tuhan yakni dengan cara bersaing melalui kompetitif berbasis moda produksi, jelas akan mengalami kekalahan. Hal ini dikarenakan secara materi, penduduk lokal kalah bersaing dengan para pendatang koloni yang membawa banyak materi untuk bisa eksistensi diri. Selain itu pula, dalam stratifikasi sosial sendiri semasa zaman kolonial menyebutkan bahwa adanya pengistimewaan terhadap posisi gereja sebagai penjaga moral dan bangsawan sebagai kelas penguasa. Di antara kedua

kelas tersebut, terjadi proses pemiskinan struktural yang terjadi dalam membentuk dinamika kehidupan masyarakat kelas bawah.

Adanya dua kondisi yang serba dilematis itulah yang pada akhirnya memunculkan adanya teologi pembebasan. Dua kalimat penting yang perlu untuk dibahas dalam membahas mengenai konteks teologi pembebasan ala Gustavo Gutierrez yakni: 1) pembelaan terhadap kaum miskin; 2) adanya transformasi gereja sebagai rumah perubahan, dan 3) perlunya menghadirkan Tuhan dalam konteks resolusi permasalahan sosial. Yang pertama, pembelaan terhadap kaum miskin. Dalam analogi teologi pembebasan, kemiskinan sendiri merupakan jalan menuju surga yang sesungguhnya. Orang miskin maupun orang papa lainnya sejatinya adalah yang seharusnya dibela dan diutamakan. Dalam proses kemiskinan itulah, sebenarnya terjadi proses perimanan yang sesungguhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Orang miskin secara politis memang selama ini mendapatkan porsi termarginalkan dan teralinearaskan oleh rezim karena ketiadaan risorsis yang dimilikinya. Namun demikian, dalam logika teologi pembebasan, posisi orang miskin sendiri memiliki kedudukan penting dalam menggerakkan suatu gerakan. Tampaknya logika sekerat sebuah roti lebih tajam daripada senjata sangatlah mempengaruhi konteks orang miskin berkembang menjadi revolusioner politik. Dalam kasus berbagai gerakan yang muncul di Dunia Ketiga sendiri, Inisiasi gerakan politik sendiri banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok orang miskin yang acap kali disebut sebagai kelas *subaltern*.

Tidaklah mengherankan apabila konteks *pueblo* (orang miskin) menjadi sangat strategis dalam teologi ini. Gerakan-gerakan populer dalam melakukan resistensi sebagian besar banyak didorong oleh inisiasi para pastor gereja-gereja Katolik. Contoh gerakan massal seperti halnya gerakan *hacienda/latifunda* yang berkembang dalam Amerika Latin hingga yang mutakhir adalah pembentukan Forum Sosial Dunia di Porto Alegre, selalu memunculkan aktor gereja sebagai penggerak. Adanya kondisi kemiskinan itulah yang menjadikan gereja kemudian berkembang sebagai alat maupun institusi progresif dalam melawan rezim. Adapun bentuk kehadiran Tuhan dalam konteks masyarakat marjinal memang menjadi penting sebagai suatu pencerahan dan spirit politik. Maka peran pastor yang dalam konteks ini sebagai nabi sosial perlu untuk dihadirkan sebagai wakil Tuhan dalam membantu memecahkan masalah sosial dan politik dalam masyarakat. Hal itu sebenarnya merupakan bentuk pelayanan umat dalam

arti riil sesungguhnya. Posisi gereja yang sedemikian eksistensial dan independen tersebut menjadikan pemikiran-pemikiran kiri berkembang dengan cepat.

Marxisme yang selama ini dianggap sebagai “musuh” dari agama kemudian dirangkul dalam konteks ideologis, kemudian dirangkul menjadi sinergisitas nilai. Sejarah mencatat konteks teologi pembebasan sendiri memainkan penting dalam memposisikan gereja sebagai posisi penting dalam politik kawasan tersebut. Gereja memainkan peran bersama dengan militer maupun rezim politik. Hubungan relasi politis yang terjadi dalam ketiga aktor yakni seringkali mutualistik, namun juga oposisi. Adapun hubungan harmonis yang tercipta acap kali terjadi dalam hubungan rezim dan militer sehingga menciptakan pemerintahan junta, Adapun posisi gereja sendiri mengalami aktor oposisi yang menciptakan adanya gerakan informal dalam masyarakat.

E. Melacak Akar Teologi Pembebasan dalam Islam

Pelacakan atas dasar-dasar pembebasan dalam Agama Islam sendiri sebenarnya bisa dilihat dalam konteks sejarahnya. Islam turun ketika masyarakat Bani Quraisy sendiri yang bermukim di kawasan Makkah tengah mengalami masa-masa jahiliyah yang begitu masif. Kondisi yang tergambarkan seperti adanya perilaku maksiat, perilaku asusila, dan segala bentuk perilaku amoral lainnya sangatlah jelas. Islam datang dan diturunkan dalam kondisi masyarakat sedemikian sebagai agama pembaharu. Namun demikian, Islam sendiri ditentang oleh masyarakat terutama kaum elite Quraisy sendiri karena sangatlah khawatir Islam sendiri akan membawa banyak perubahan dalam kondisi tata sosial yang telah dibangun selama ini.

Maka dalam konteks ini perlu dilihat bahwa esensi Islam sebenarnya juga membawa proses dekonstruksi terhadap bangunan struktur lama yang dinilai hanya akan menimbulkan penindasan semata. Islam secara origin membawa semangat restrukturisasi masyarakat yang dinilai masih jahilliyah menuju pada proses Islam yang *kāffah* (sempurna). Maka untuk menuju proses *kāffah* tersebut memerlukan berbagai macam nilai dan norma sebagai basis pengikat basis inheren. Adapun nilai-nilai teologis Islam yang menjadi dasar “pembebasan” tersebut seperti halnya *al-‘adālah* (keadilan), *al-musāwah* (egalitarianisme; kesetaraan; persamaan derajat), dan *al-ḥurriyyah* (kebebasan).⁸

⁸Fawaizul Umam, “Paradigma Teologi Pembebasan: Suatu Upaya Reformulasi Agama Islam,” <http://idb3.wikispaces.com/file/view/rk3015.pdf>, diakses pada tanggal 11 Maret 2014.

Ketiga konsep itulah yang sebenarnya menjadi cara melihat Islam sebagai teologis sebenarnya tidaklah terlalu mengukuhkan kekuasaan ulama maupun *ulil amri* sebagai kedua entitas yang perlu untuk dipatuhi. Adapun kejatuhan periode kepemimpinan politik Islam di dunia sendiri yang dimulai dari semasa *Reconquista* hingga pada kekalahan telak dalam perang Salib dan kekalahan kekhalifahan Abbasiyah maupun Fatimiyyah membuat dimensi religiositas dalam teologi Islam menjadi berkurang.

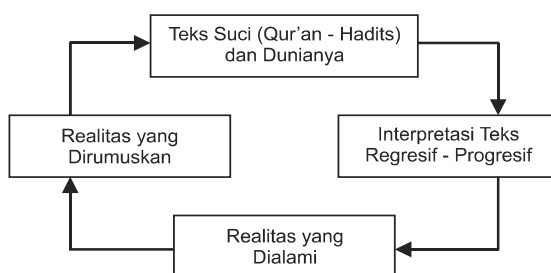
Adapun dalam perkembangan selanjutnya, teologi Islam justru terpecah antara ketiga mazhab yakni rasional, konservatif, maupun liberal. Adapun isu revivalisme yang diangkat oleh kalangan konservatifisme sendiri pada dasarnya mengarahkan teologi Islam justru mengarah pada teosentris yang berpaku pada doktrin *'aqidah waḥdaniyyah* yang berpaku pada konsep *taqlid* pada agama dan dogma ekstalogis/predestinasi. Pengarusutamaan pada konsep ekstaologis inilah yang membuat teologi Islam menjadi berkembang sangat konservatif, di mana hanya hanya mengejar kekuasaan semata, Sementara di saat indoktrinasi dan proses dogma terhadap agama sendiri berkembang dengan masif. Terjadi pada proses pembiaran terhadap kehidupan masyarakat Muslim yang kemudian menjadi serba terbelakang karena ulama dan pemimpin berada di puncak menara gading dan membuat strata sendiri di atas masyarakat.

Berkaca pada proses keterbelakangan dan marjinalisasi tersebut, itulah yang kemudian menimbulkan adanya berbagai bentuk pemikiran kritis terhadap teologi Islam. Adapun pemahaman teologi yang semula berkembang dalam doktrin *waḥdaniyyah* mulai beralih pada *'aqidah taḥarruriyyah* yakni teologi yang mengarah pada pembebasan manusia dari segala bentuk ketertindasan. Munculnya aliran baru dalam teologi tersebut sejatinya merupakan bentuk hasil pergulatan dialektis terhadap hadirnya teologi sebagai bentuk resolusi permasalahan sosial di dunia. Doktrin predestinasi yang selama ini dianut Islam sendiri lebih mengarah kepada proses pembentukan manusia terpilih, namun abai terhadap proses sosial dalam masyarakat.

Dalam hal ini, *kalāmullāh* tidaklah selalu mengarahkan pada pembentukan rasa patuh dan tunduk pada Tuhan Yang Maha Esa. Konteks "Kerajaan Allah" sebagaimana yang menjadi basis teologi pembebasan Kristen sendiri pada dasarnya memiliki karakteristik sama dengan Islam. Dalam doktrin Islam sendiri, kehadiran Tuhan dalam konteks relasi sosial sendiri terletak pada proses *ḥabl minā'l-nās* yang selama ini kurang diperhatikan. Lahirnya doktrin *'aqidah taḥarruriyyah* sendiri mengarahkan pada proses pemikiran herme-

neutika dalam proses agama. Harus diakui untuk mempribumisasikan teologi dalam Islam sendiri memang sangatlah distortif dan mengundang banyak perdebatan. Dimensi teologi yang masih transedental perlu untuk diterjemahkan dalam ranah sosial melalui kerangka profetik. Pengarusutamaan pada nilai-nilai kemanusiaan maupun toleransi inilah kemudian coba dikontekstualisasikan dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits.

Adapun pemikiran teologi pembebasan yang berkembang dalam konteks pemikir Islam sebagian besar dipenuhi cara berpikir hermeneutika yakni berusaha untuk melakukan *critical review* terhadap doktrin teologis Islam yang berkembang selama ini. Perkembangan doktrin teologis Islam sendiri sudah seharusnya untuk dilakukan proses revisi dikarenakan tidak sesuai dengan konteks kekinian. Berbagai macam anasir-anasir yang berkembang dalam doktrin teologis Islam secara mayoritas mengukuhkan adanya pengukuhan kekuasaan teokrasi yakni sakralisasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun pengkultusan ulama dan penguasa sebagai *khalifah* di bumi. Perkembangan metode hermeneutika terhadap teks al-Qur'an maupun Hadits memang didasari pada niatan untuk mengintepretasi secara ulang dan mendekonstruksi sakralitas tersebut untuk lebih membumi dalma menghadapi masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Adapun deskripsi metode hermeneutika dalam teologi pembebasan Islam adalah sebagai berikut ini.



Gambar 1.
Logika Hermeneutika dalam Teologi Pembebasan Islam

Sumber: (Umam, n.d: 10)

Jika merunut pada pemaknaan dalam label tersebut, sebenarnya terdapat proses dialektis dalam merumuskan realita. Realita sendiri dirumuskan dalam

untuk melihat proses kehidupan sosial sejak zaman Nabi (*by regressive*) maupun untuk melihat ke depan (*by progressive*). Artinya terdapat idiosinkratik dalam menafsirkan teologi dalam Islam. Memang, metode hermeneutika sendiri mendapat banyak kritikan dari beberapa ulama terutama menyangkut terhadap kandungan otensitas dalam al-Qur'an maupun Hadits. Namun hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah pelik, terlebih bila melihat berbagai kemunduran yang dialami oleh masyarakat Islam baik secara politis maupun ekonomi. Kondisi itu yang memungkinkan adanya berbagai perkembangan pemikiran politik progresif-inklusif dalam menautkan progresifisme dengan teologis Islam.

Adapun pemikiran Islam yang pertama tentang pembahasan teologi pembebasan Islam sendiri datang dari 'Ali Ashgar Engineering. Asghar dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Teologi Pembebasan* banyak menyoroti terhadap slogan ikonik "perubahan" yang diusung oleh gerakan pembaruan Islam pada era 1970-1980an di Timur Tengah. "Perubahan" yang dimaksudkan ialah munculnya gerakan revivalisme Islam agar kembali pada *khittah*-nya seperti pada zaman Nabi. Berbagai produk "teologis" seperti Pan Islamisme ala Jamaluddin al-Afghani, Pemurnian Islam ala Sayyiq Quthb, maupun *Khalifah* Islam ala Wahhabisme maupun Syi'ah merupakan bentuk dari produk revivalisme tersebut. Hanya saja yang menjadi lokus kritis yang diutarakan oleh Engineering sendiri terlatak pada pertanyaan yakni "perubahan itu untuk siapa"?⁹

Perubahan yang marak terjadi dengan mengatasnamakan pada "perubahan" tersebut pada akhirnya mengarahkan pada pembentukan pemerintahan otoritarian yang dikuasai oleh kongsi penguasa maupun ulama. Kelompok Ulama Sunni banyak berkongsi dengan keluarga-keluarga dinasti politik di Timur Tengah, begitupun juga dengan rezim Mullah yang pada akhirnya hanya meneruskan politik genealogis Ahlul Bait yang menegaskan pada praktik hegemonik yang dilakukan rezim kepada rakyatnya. Hal itulah yang menjadikan Engineering berusaha untuk meramu kembali gagasan-gagasan mengenai profetisasi agama Islam dalam teologi pembebasan.

Berbeda halnya, dengan spirit teologi pembebasan yang diusung dalam teologi pembebasan dalam rumpun Judeo-Christiani yang menekankan pada spirit *church of the poors*. Dalam analogi teologi pembebasan islami sendiri menekankan pada tiga nilai mendasar yakni: 1) egalitarianisme; 2) keadilan

⁹Asghar 'Ali Engineer, *Islam & Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

sosial, dan 3) kebersamaan. Adapun dalam penekanan egalitarianism yakni mendaraskan pemikiran kepada pemahaman bahwa manusia sendiri dilahirkan pada semangat dan derajat yang sama. Artinya proses indoktrinasi maupu proses dogmatik lainnya yang mengarahkan pada pengkultusan dan mengabaikan pada proses penghargaan atas kemanusiaan itu sama saja dengan mengdegradasikan nilai-nilai agama itu sendiri. Bahwa manusia tersebut diciptakan setara dan seimbang itulah hal yang mutlak perlu dibawa dalam pembawaan esensi agama Islam yang *kāffah* dan menekankan pada proses *tasamuh* (toleransi).

Engineering melihat bahwa konsep egalitarianisme inilah yang acapkali hilang dalam pembahasan teologi Islam. Adanya pola hierarkis dan patronase yang seolah dimonumentalisasi itulah yang menciptakan adanya penindasan yang terjadi dalam masyarakat. Terbentuknya kluster kelas yang hegemonik dengan legitimasi ritus ibadah maupun ritus kuasa pada akhirnya menciptakan proses redistribusi keadilan sosial sendiri tidak berjalan dengan seimbang. Esensi keadilan sosial sendiri memang merunut pada bunyi Qur'an maupun Hadits yang menganjurkan untuk saling berbagi dan saling berderma demi mengurangi kesenjangan sosial maupun sebagai upaya pembersihan harta yang dinilai masih kurang bersih. Adapun makna kebersamaan yang menjadi lokus nilai dalam pembahasan Engineering sendiri pada dasarnya merupakan bentuk otokritik terhadap fragmentasi dalam mazhab Islam yang malah mengarahkan pada perpecahan Islam.

Semangat *ukhuwwah* sendiri perlu dikedepankan untuk mengurangi adanya ketimpangan tersebut. Adapun pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Engineering sendiri banyak terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran daripada Ibnu Taimmiyah. Taimmiyah pernah mengkritik adanya kekuasaan negara yang dinilai terlalu fungsionalistik dalam merekatkan agama dengan masyarakat sebagai basis penguat legitimasi negara. Kondisi itulah yang menyebabkan agama Islam terpolitisasi secara struktur dalam sistem yang rigid dan hegemonik. Hal itulah yang menjadikan adanya teologi Islam menjadi teologi politik yang mengikat secara politis masyarakat dengan fatwa dan aliran mazhab pemahaman tertentu.

Maka di tengah kondisi yang serba politis dan serba *chaotic* itulah yang menyebabkan adanya gerakan-gerakan Islam populis dalam akar masyarakat. Semangat yang didengungkan tentu saja adalah reformasi dan restrukturisasi terhadap kondisi masyarakat yang diakibatkan kongsi agama dan politik yang

terlalu sangat koersif. Dalam perkembangan selanjutnya, teologi pembebasan banyak mengilhami munculnya gerakan-gerakan populis baik yang mengarah pada munculnya gerakan sekulerisme maupun pada munculnya pemerintahan transformatif. Pada awalnya gerakan populis sendiri muncul pada di daerah Mesir maupun Turki yang memperlihatkan kondisi Islam yang serba tertindas oleh rezim yang berkuasa. Dalam hal ini, rivalitas mazhab dan kekuasaan *bani* politik yang serba otoritarian. Dalam kondisi Mesir sendiri, kekuasaan Sunni yang berkolaborasi dengan rezim militer telah mengakibatkan adanya minoritisasi dan marjinalisasi kelangsungan politik Islam.

Hal itulah yang kemudian menimbulkan resistensi dari kelompok-kelompok Islam tersebut bahwa sudah saatnya dilakukan restrukturisasi terhadap operasionalisasi rezim yang selama ini dinilai terlalu pro Barat.¹⁰ Maka pemerintahan transformatif sendiri adalah solusi terhadap ketimpangan politis dengan mengedepankan dogma-dogma agama yang serba inklusif dan mengedepankan pada spirit kemanusiaan. Sedangkan apabila teologi pembebasan yang mengarahkan pada sekulerisasi bertujuan untuk menciptakan ruang-ruang dikotomis antara negara sebagai entitas profan maupun agama sebagai entitas profetik. Adanya pemberian dua ruang tersebut sebenarnya bertujuan untuk mencegah adanya intervensi politik yang terlalu merecoki pada kemurnian agama sehingga mudah untuk terpolitisir. Hal itu juga dimaksudkan agar negara memiliki ruang tersendiri untuk mengembangkan ekspresi politik tanpa harus memperkuat legitimasinya dengan agama.

Selain halnya dengan Engineering sendiri, rumusan mengenai teologi pembebasan juga datang dari 'Ali Syariati. Berangkat dari latar belakang sama yakni penindasan umat Islam yang diakibatkan oleh rezim otoritarian. Namun demikian, berbeda halnya dengan Engineering yang merumuskan pada ketiga aspek teologi pembebasan yakni egalitarianisme, kebersamaan, dan keadilan sosial. 'Ali Syariati lebih menekankan pada munculnya tauhid sosial yang menjadi dasar dalam perumusan teologi pembebasan dalam agama Islam. Dalam konteks ini, membicarakan sosok 'Ali Syariati memang agak kompleks. 'Ali sendiri adalah penganut politik Syi'ah yang sudah tentu mengutamakan adanya kepemimpinan teokrasi pimpinan para Mullah yang mengaku-akui dirinya sebagai keturunan dari Ahlul

¹⁰Hamid Dabashi, *Islamic Liberation Theology*, (London: Routledge, 2008), h. 14-15.

Bait. Syariati sendiri menilai bahwa pemerintahan teokrasi Iran yang dilaksanakan sendiri banyak yang melenceng pada penerapan tauhid yang sesungguhnya.

Menurut Syariati, penerapan tauhid yang berorientasi pada pemenuhan spiritualitas transteden sudah tidak sesuai lagi dengan konteks era sekarang ini¹¹. Adapun bentuk konkret daripada spiritualitas transteden yang mengarahkan pada pengkultusan ulama untuk berperan secara dwi fungsi yakni sebagai pemimpin politik maupun pemimpin agama dalam satu entitas justru hanya akan membawa pada tumpang tindihnya persoalan dunia dengan ukhrawi. Implikasi yang ditimbulkan adalah teologi sendiri hanya akan berkembang pada ajaran panoptikon yang senantiasa melihat secara politis pergerakan warga negara. Pola pendisiplinan yang terkesan agak “dipaksakan” itulah yang menjadikan politisasi agama menjadi sebuah keniscayaan untuk dilaksanakan secara subordinatif.

Dalam anasir yang dikembangkan oleh Syariati, pencapaian spiritualitas sebagaimana yang diinginkan dalam doktrin Syi’ah sebenarnya tidak selalu harus melekatkan pada ritus simbol transteden yang pada akhirnya akan mengulang konsep Gereja Roma dalam Islam. Pencapaian spiritualitas yang bertujuan untuk mendekatkan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan menerapkan syariat-Nya di dunia pada era sekarang perlu untuk direkonstruksi ulang. Konsep ketauhidan yang seperti demikian sudah selayaknya untuk didekatkan untuk membaca realitas-realitas sosial dalam masyarakat. Adapun yang dimaksudkan konsep tauhid tersebut perlu dilihat sebagai konteks sebagai kebebasan berkeinginan (*free of wills*) semua umat manusia di dunia. Artinya bahwa membaca tauhid tidaklah selalu untuk diterapkan sebagai bentuk keinginan Tuhan saja yang seolah ditempatkan sebagai pemegang kuasa otoritatif terhadap manusia. Tauhid bukanlah serigid untuk diterapkan manifestasi keinginan Tuhan saja.

Maka konteks penting yang ingin dilihat dalam melihat spiritualitas di segi teologi pembebasan di sini adalah pembebasan dan pencerahan. Pembebasan dimaknai sebagai bentuk agama dimaknai secara sinkretis yakni sebagai bentuk konsensus tentang hal baik dan buruk beserta konsekuensi yang diterima dari perbuatan tersebut. Agama tidaklah selalu dimaknai sebagai bentuk hukuman

¹¹Sabara, “Teologi Pembebasan Ali Syariati”, http://indonesian.irib.ir/artikel1/-/asset_publisher/7xTQ/content/teologi-pembebasan-ali-syariati-bagian-pertama/pop_up, diakses pada tanggal 24 Maret 2014.

(*judgement*) dari Tuhan kepada manusia di dunia, yang pada akhirnya mengarahkan terciptanya sang penolong (*messiah*). Adapun pola tauhid yang sedemikian itulah menciptakan adanya politik *privilese* kepada ulama yang nantinya akan dikultuskan.

Maka, adanya politisasi berupa intepretasi makna terhadap dogma-dogma agama itulah yang perlu untuk direduksi. Sedangkan makna pencerahan adalah memberikan pencerahan terhadap kajian-kajian agama yang acap kali dipolitisir menjadi penguat legitimasi terhadap kekuasaan politik tertentu. Dalam pembahasan yang lain disebutkan bahwa pencerahan juga diartikan sebagai pembebasan atas dogma-dogma yang konservatif yang mengarahkan pada pemberian bentuk previlise kepada kelas tertentu. Maka secara garis besar teologi pembebasan sendiri banyak mendeskripsikan tentang pemahaman desakralisasi maupun dekonstruksi terhadap intepretasi teks-teks agama yang acap kali terpolitisasi oleh kepentingan politik

F. Kesimpulan

Perbincangan tentang relasi agama dan politik dalam analogi teologi pembebasan sendiri mengarahkan pada proses dekonstruksi maupun desakralisasi terhadap teks-teks agama. Harus diakui bahwa relasi agama dan politik sendiri sangatlah resiprokal dan memiliki proses tarik-menarik yang cukup kuat antar keduanya. Agama bisa mempengaruhi dan terpengaruhi politik dalam skope luas maupun kecil. Implikasi yang ditimbulkan adalah munculnya interpretasi politik terhadap teks-teks agama yang pada akhirnya menciptakan adanya sakralisasi maupun pengkultusan. Teologi yang sebelumnya berfungsi diametris yakni penghubung Tuhan dan manusia maupun sesama manusia justru mengarahkan pada proses hierarkis yakni dari Tuhan kepada manusia melalui ulama maupun negara.

Anasir Marx tentang agama adalah candu, sebenarnya merupakan bentuk kritikan terhadap agama itu sendiri. Politisasi agama justru mengarahkan pada proses eklektisisme kehidupan sehingga menciptakan ada kelas masyarakat yang *previeleged* maupun kelas masyarakat yang *neglected*. Logika teologi pembebasan terlahir dari proses dialektis dan hermeneutika terhadap pemahaman agama yang dinilai masih konservatif untuk dipahami dan dijabarkan dalam masyarakat. Esensi dan spirit yang dibawakan teologi pembebasan ini pada dasarnya mengajak pada inklusivitas agama agar lebih membumi dalam meng-

hadirkan resolusi masalah bagi manusia. Esensi pembebasan yang diusung dalam teologi mengajak pada pemahaman nilai-nilai origin dihadirkan dan dilahirkan agamanya di dunia yakni membebaskan umat manusia dari kezaliman menuju kesengsaraan. Penerapan teologi pembebasan setidaknya menjadi ideologi transformatif dalam melihat relasi agama dan politik ke depannya.[w]

BIBLOGRAFI

- Cook, Michael, "Jesus from The Other Side of History: Christology in Latin America," *Journal Current Theology*, Vol. 44, No. 2.
- Dabashi, Hamid, *Islamic Liberation Theology*, London: Routledge, 2008.
- Engineer, Asghar 'Ali, *Islam & Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Natalie, "Evaluasi Kritis terhadap Doktrin Gereja dari Teologi Pembebasan," *Jurnal Veritas*, Vol. 1, No. 2, 2000.
- Nickloff, James, "Church of The Poor: The Ecclesiology of Gustavo Gutierrez," *Journal Theological Studies*, Vol. 54, No. 1, 1993.
- Petras, James, *Social Movement in Latin America*, New York: Palgrave, 2011.
- Suhelmi, Ahmad., *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Wahono, Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Internet:

- Sabara, "Teologi Pembebasan Ali Syariat", http://indonesian.tribe.ir/artikel1/-/asset_publisher/7xTQ/content/teologi-pembebasan-ali-syariat-bagian-pertama/pop_up, diakses pada tanggal 24 Maret 2014.
- Sprague, Ted, "Pendahuluan pada Sumbangan untuk Kritik terhadap Filsafat Hak Hegel", <https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1844/PendahuluanSumbangan.htm>, diakses pada tanggal 27 Maret 2014.
- Umam, Fawaizul, "Paradigma Teologi Pembebasan: Suatu Upaya Reformulasi Agama Islam," <http://idb3.wikispaces.com/file/view/rk3015.pdf>, diakses pada tanggal 11 Maret 2014.

